

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

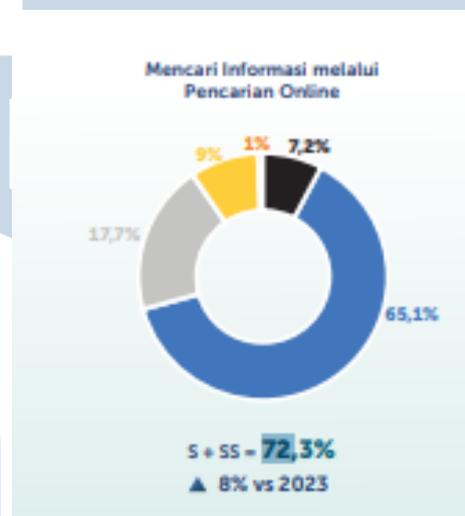
Dalam beberapa tahun terakhir, arah dan orientasi pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good governance*. *Good Governance* ini sendiri mencakup beberapa hal-hal penting seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi (UNDP, 1997) maka dari itu prinsip tersebut dapat menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional dalam tingkat ke pemerintahan umum hingga ke pemerintahan daerah, pemerintahan pusat pun pada akhirnya mendorong para pemerintahan daerah untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan namun juga memperkuat sistem pengawasan dan juga transparansi akan informasi yang dibutuhkan masyarakat demi menjaga kualitas pelayanan dan juga menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip *good governance* itu sendiri dengan cara menghadirkan fungsi pengawasan internal seperti kehadiran inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan Inten Pemerintah (APIP). Inspektorat sendiri tidak hanya menjalankan tugas dalam fungsi kontrol dan evaluasi namun juga berperan sebagai mitra yang akan membantu dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintahan daerah agar dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang pastinya harus berdampak bagi masyarakat juga (BPKP, 2020). Inspektorat Kota Balikpapan merupakan bagian dari Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Namun demikian dalam dunia nyata praktek yang dilakukan adalah dengan cara inspektorat melakukan pengawasan yang tidak hanya berfokus pada aspek administrasi ataupun teknis saja. Pada saat ini era digital ditandai dengan

adanya arus peningkatan informasi yang memberikan tuntutan untuk selalu transparan kepada publik sehingga memberikan efek penuntutan pemerintah yang lebih terbuka kepada masyarakat dan juga harus selalu komunikatif terhadap masyarakat. Di sinilah titik mulai terlihatnya bahwa peran komunikasi publik dan juga peran kehumasan mulai terlihat. Humas sendiri menurut

Menurut data (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2024) sebanyak 72,3% masyarakat Indonesia melakukan pencarian informasi melalui media digital sebagai sumber utama informasi.



Gambar 1. 1 Data Pencarian Informasi melalui Media Online

Sumber : (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2024)

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan melalui media sosial dan juga *website* resmi menjadi sarana penting dalam membangun kepercayaan dan juga partisipasi publik. Dalam hal ini berarti fungsi kehumasan itu tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap tetapi juga sebagai pintu utama dalam membangun citra dan juga transparansi lembaga di masa-masa digital saat ini.

Kehumasan sendiri memiliki fungsi yang sangat kuat di pemerintahan, menurut (Permen PAN RB, 2011) menyatakan bahwa kehumasan pemerintah

bertugas membangun, memperkuat, dan menjaga citra serta reputasi positif instansi pemerintah, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat, akurat, dan mudah dipahami. Fungsi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat *good governance* dan akuntabilitas publik (Permen PAN RB, 2011), Pasal 2 dan 4. Dengan demikian, kehumasan di lingkungan Inspektorat menjadi instrumen pendukung utama dalam menjamin keberhasilan fungsi pengawasan.

Inspektorat Kota Balikpapan sendiri mulai menyadari pentingnya aspek komunikasi publik dalam menjalankan tugas pengawasan. Selama ini, sebagian besar informasi pengawasan dan program kerja disampaikan melalui komunikasi langsung atau melalui laporan ke pimpinan daerah, namun masih minim upaya untuk menyampaikan informasi tersebut secara aktif kepada publik. Hal ini menimbulkan kesenjangan komunikasi antara lembaga dan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah dijalankan, sejauh mana pengawasan dilakukan, dan seperti apa kinerja lembaga pengawas. Kondisi ini menjadi salah satu alasan kuat bagi penulis untuk memilih Inspektorat Kota Balikpapan sebagai tempat melaksanakan kegiatan magang, penulis melihat adanya kebutuhan strategis dari lembaga ini dalam penguatan fungsi kehumasan yang belum tergarap maksimal. Minimnya sumber daya khusus di bidang komunikasi, serta belum adanya strategi komunikasi digital yang terstruktur, menjadi tantangan yang dapat dibantu dengan pendekatan kehumasan modern.

Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, penulis merasa terdorong untuk terlibat langsung dalam mengembangkan pendekatan komunikasi publik yang sesuai dengan kebutuhan Inspektorat Kota Balikpapan. Melalui kegiatan magang ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam menyusun strategi komunikasi kehumasan yang lebih efektif, memperkuat kanal informasi publik, serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan kegiatan pengawasan secara transparan dan profesional. Dengan terlibat secara langsung dalam aktivitas komunikasi dan kehumasan di lembaga pemerintahan daerah, penulis tidak hanya mendapatkan pemahaman praktis mengenai penerapan kehumasan di sektor publik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung prinsip *good governance* di

tingkat pemerintahan daerah. Pengalaman ini akan menjadi bekal penting bagi penulis untuk memahami dan mengembangkan profesi kehumasan secara lebih luas di masa depan.

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang

Aktivitas magang ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja secara langsung, pada saat ini penulis mencoba melakukan kerja magang di instansi pemerintahan daerah Inspektorat Balikpapan.

1. Mengimplementasikan ilmu dan teori kehumasan yang telah dipelajari selama melakukan perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata seperti peran humas dan juga publikasi.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman mahasiswa di dunia kerja sebagai Humas khususnya di lingkungan pemerintahan daerah Inspektorat kota Balikpapan
3. Mengembangkan ketrampilan *Hard Skill* maupun *Soft Skill* di Inspektorat Kota Balikpapan sebagai Humas *Intern*

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan magang ini mulai pada 3 Februari 2025 hingga 17 Juni 2025 dengan total 81 hari kerja atau 647 (enam ratus empat puluh) jam kerja sesuai dengan Panduan MBKM Magang *Track 1* dan sesuai dengan arahan dari program Studi.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

Mahasiswa wajib mengikuti *zoom meeting* pembekalan magang yang telah diinformasikan oleh program studi Ilmu Komunikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

1. Melakukan pengisian KRS *internship* melalui myumn.ac.id dengan memilih MBKM *Track 1*

2. Mencari dan mengajukan tempat magang melalui Google Form KM-01 bisa lebih dari satu kali untuk memilih tempat magang yang memenuhi syarat dan mendapat persetujuan kampus dalam bentuk KM-02 (Surat Pengantar Magang) dari Ketua Program Studi.
3. Mengisi dan melakukan pengiriman formulir KM-02 pada merdeka.umn.ac.id ketika sudah mendapatkan perusahaan atau lembaga yang sesuai dengan kriteria yang ketua prodi anjurkan.
4. Selanjutnya, mengunduh formulir KM-03 (Kartu Kerja Magang), mengisi *daily task* melalui *website* merdeka.umn.ac.id.

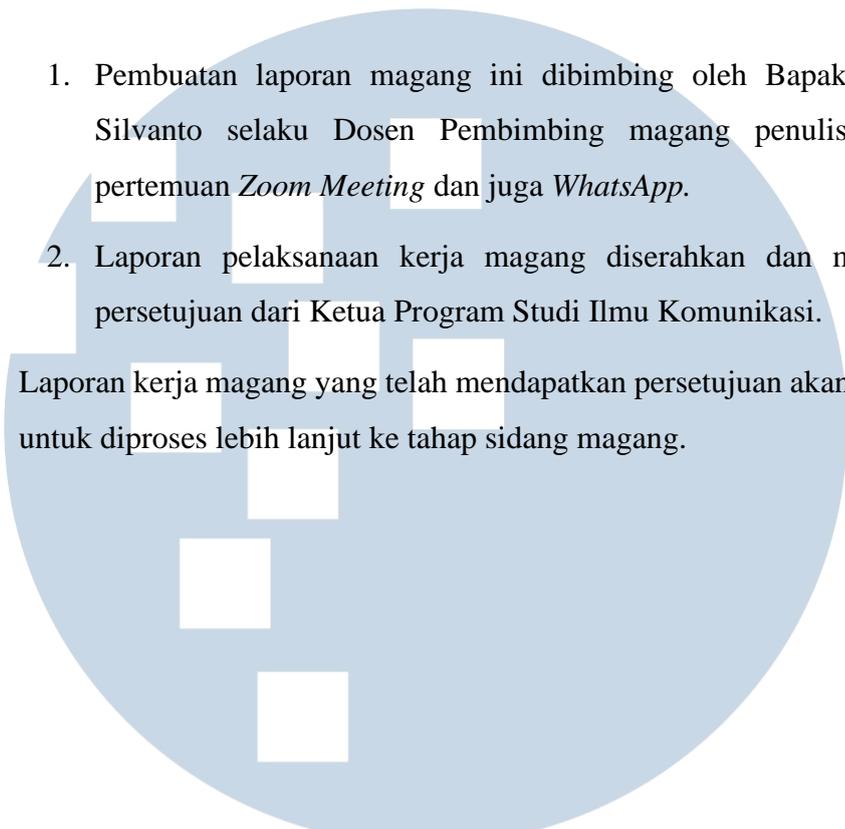
B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang

1. Proses pengajuan magang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2025 dengan mengirimkan surat pengantar kerja magang dari kepala Program Studi ke kantor Inspektorat Balikpapan.
2. Setelah disetujui dan diterima, Penulis resmi bekerja sebagai magang di inspektorat pada tanggal 3 Februari 2025 dan mendapatkan surat penerimaan kerja magang di tanggal 10 Februari 2025 yang telah ditandatangani oleh Inspektur Ibu Silvia Rahmadina.

C. Proses Pelaksanaan Praktek Kerja Magang

1. Praktek kerja magang yang penulis jalankan mendapatkan posisi sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) *Intern*.
2. Seluruh tugas dan kebutuhan informasi mengenai Inspektorat yang penulis butuh kan didampingi oleh Kasubag Umum M. Andhika Pratama,S. IP selaku pembimbing selama penulis melakukan magang.
3. Segala bentuk pengisian *daily task* di *website* umn merdeka dilakukan pada saat proses magang berjalan

D. Proses Pembuatan Laporan Praktek Kerja Magang.

- 
1. Pembuatan laporan magang ini dibimbing oleh Bapak Heryadi Silvanto selaku Dosen Pembimbing magang penulis melalui pertemuan *Zoom Meeting* dan juga *WhatsApp*.
 2. Laporan pelaksanaan kerja magang diserahkan dan menunggu persetujuan dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi.
- E. Laporan kerja magang yang telah mendapatkan persetujuan akan diajukan untuk diproses lebih lanjut ke tahap sidang magang.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA